

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan akuntansi dalam sebuah entitas bisnis dan organisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin kepercayaan pemegang saham, investor, dan pihak terkait lainnya terhadap keadaan keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan berguna membantu para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan dan evaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan harus dibuat berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diandalkan dan membantu menjamin kepercayaan. Laporan keuangan yang tidak dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut tidak akurat dan transparan (Rahayu & Dewi, 2022). Hal ini dapat memunculkan tindak kecurangan akuntansi seperti manipulasi data keuangan, ketidakakuratan data, ketidaktransparanan, dan ketidaktepatan.

Kecurangan akuntansi saat ini menjadi isu yang mencemaskan dalam dunia bisnis dan keuangan dengan dampak yang merugikan para pemakai dan manajemen. Di Indonesia kecurangan akuntansi masih sering terjadi baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), kecurangan akuntansi merupakan salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan (Juliantari et al., 2021). Kecurangan akuntansi memiliki kaitan erat dengan pengelolaan dan pencatatan keuangan. Kecurangan akuntansi

mencakup praktik tidak etis dengan tujuan memanipulasi informasi keuangan seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan asset.

Organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan sangat rentan terjadinya kasus kecurangan akuntansi. Uang dan nilai finansial merupakan motivasi utama bagi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kecurangan demi kepentingan pribadi. Salah satu lembaga keuangan di Bali yang rentan terjadi kasus kecurangan akuntansi adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sebagai Lembaga keuangan non-bank, LPD dikelola, didirikan, dan dimiliki oleh Desa Pakraman di Bali. Manajemen LPD perlu dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabel guna mencegah terjadinya penyelewengan dana yang dapat merugikan krama desa adat selaku pemilik sah dari Lembaga ini. LPD merupakan Lembaga keuangan non formal yang diawasi oleh Lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS UKM), Dinas Koperasi dan UKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Kabupaten Gianyar LPD memiliki peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi lokal. Adanya LPD dapat membantu upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kegiatan perkreditan yang akan membantu berjalannya kegiatan usaha di daerah pedesaan. LPD mendukung keberhasilan perekonomian rakyat yang memiliki basis masyarakat hukum adat di Bali sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (Piadnyan et al., 2020). Di Kabupaten Gianyar terdapat sebanyak 297 LPD yang tersebar di 7 kecamatan. Adapaun daftar jumlah LPD yang terdapat di Kabupaten Gianyar, dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar LPD di Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	Jumlah
1	Payangan	48 Unit
2	Tegallalang	45 Unit
3	Gianyar	40 Unit
4	Tampaksiring	36 Unit
5	Elahbatuh	36 Unit
6	Sukawati	33 Unit
7	Ubud	32 Unit
Total		297 Unit

(Sumber: Laporan Gabungan LPLPD Kab. Gianyar, 2023)

Semakin pesatnya berkembangnya LPD, juga banyak ditemukan kasus-kasus kecurangan akuntansi yang terjadi. Kecurangan pada lembaga perkreditan desa dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti niat maupun tekanan dari pelaku kecurangan, kesempatan dalam melakukan kecurangan dengan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, dan rasionalisasi yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Bentuk kecurangan yang terjadi seperti manipulasi laporan keuangan dan korupsi terhadap simpanan dan pinjaman nasabah. Selain itu, faktor internal seperti lemahnya fungsi pengawasan, ketiadaan sistem, dan tata Kelola yang lemah juga turut mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi di lembaga perkreditan desa.

Banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di LPD di Bali telah banyak menarik perhatian Masyarakat. LPD diwajibkan menjalankan praktik akuntansi yang jujur, etis, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam Upaya menjaga transparansi Masyarakat. Namun, terdapat beberapa kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar Bali. Ringkasan beberapa kasus kecurangan (*fraud*) yang pernah terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Ringkasan Kasus Kecurangan (Fraud) pada LPD di Kabupaten Gianyar

Sumber	Kasus	Pelaku	Kerugian
Balipost.com (2022).	Kecurangan pada LPD Desa Pakraman Belusung, Kecamatan Tampaksiring terkait penggelapan dana nasabah, dengan tidak mencatat jumlah setoran dari nasabah.	Dua pegawai LPD Desa Adat Belusung, Kecamatan Tampaksiring.	Rp 2,6 miliar.
Bali Express (2022).	Kecurangan dengan modus kredit fiktif pada LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud.	Ketua LPD dan Bendahara LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud.	Rp 1 miliar.
Balipost.com (2017)	Kecurangan dengan modus kredit fiktif di LPD Desa Pakraman suwat, Kecamatan Gianyar.	Tiga pegawai LPD Desa Pakraman suwat, Kecamatan Gianyar.	Rp 800 juta

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa kasus kecurangan pada LPD masih sering terjadi dengan kasus terbaru dan mengakibatkan kerugian paling besar adalah kasus kecurangan di Kecamatan Tampaksiring. Kasus tersebut tidak hanya kasus yang paling besar pada Tahun 2022 namun merupakan kasus kecurangan LPD yang paling besar sejak tahun 2018. Kecurangan tersebut terjadi pada LPD Desa Pakraman Belusung berupa tindak pidana korupsi. Kasus tersebut dilakukan oleh oknum karyawan LPD dengan cara tidak mencatat setoran dana nasabah dan diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Menurut Hasil audit LPD Desa Adat Belusung yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Gianyar, dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp.2.636.956,000 (Balipost.com, 2022). Motif dugaan korupsi yang dilakukan Puspawati adalah dengan cara tidak mencatat tabungan nasabah dalam sistem komputer LPD

Belusung. Kasus tersebut mengakibatkan LPD Pakraman Belusung pailit dan dinonaktifkan karena mengalami kerugian yang besar. Puspawati didakwa melakukan pidana korupsi LPD Belusung karena tidak mencatatkan jumlah dana tabungan nasabah pada data atau sistem komputer LPD, serta terdakwa membuat bilyet deposito tanpa sepengetahuan Ketua LPD dan tidak menyetorkan deposito pada LPD. Terdakwa dibantu oleh pegawai LPD Belusung lainnya yaitu NWP telah melakukan penarikan dana tabungan tanpa sepengetahuan nasabah. Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Fraud Triangel (Segitiga Kecurangan) adalah sebuah teori yang memaparkan tiga hal yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Teori ini terdiri dari 3 elemen yang saling berkaitan (Cressey, 1950). Dalam elemen *fraud triangle* terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kecurangan pada LPD berdasarkan kasus diatas. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu, pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan penerapan sistem terkomputerisasi.

Faktor pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang kuat berfungsi untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Elemen peluang dalam *Fraud Triangle* dapat dikurangi dengan penerapan pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, dan monitoring yang berkelanjutan. Ketika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan akan semakin sedikit, sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

Pengendalian internal adalah suatu sistem organisasi yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Tujuan pengendalian internal mencakup aspek strategis, pelaporan keuangan, operasional,

dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Andari & Ismatullah, 2019). Di dalam sebuah instansi bisnis atau organisasi, penerapan pengendalian internal menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi. Penerapan suatu sistem pengendalian internal akan membuat semua operasi, sumber daya, dan data akan terkendali, tujuan akan tercapai, risiko dapat diminimalisir (Anggreni & Dewi, 2022). Penelitian Sukadwilinda & Ratnawati (2013) menunjukkan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh sebesar 60,2% terhadap kecurangan. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, diharapkan mampu melindungi LPD dari tindakan kecurangan yang dapat merugikan.

Kasus kecurangan di LPD Desa Pakraman Belusung yang dilakukan oleh karyawan tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan kasus tersebut terjadi karena terdakwa mampu membuat bilyet deposito tanpa sepengetahuan Ketua LPD dan tidak menyetorkan deposito pada LPD. Dari motif tersebut dapat diketahui bahwasannya adanya tindakan berupa kurangnya pengawasan, pemantauan, dan tidak adanya evaluasi di LPD. Sehingga, karyawan dengan mudah membuat sesuatu yang manipulatif sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam LPD tersebut. Seharusnya, pengendalian internal dapat dilakukan oleh berbagai pihak di dalam organisasi, seperti manajemen, bagian keuangan, dan seluruh pegawai. Hal ini mencakup penerapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengamankan aset perusahaan, mendorong karyawan agar mematuhi kebijakan manajemen, serta memastikan keakuratan laporan keuangan.

Kesenjangan penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang meneliti variabel pengendalian internal yang dilakukan oleh Melasari & Sukei (2022), menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini didukung oleh Husnatarina & Diarsyad (2023). Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Putri (2021), Hama et al. (2021), dan Febrianti & Kusmawati (2022), mereka memperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi. Semakin baik sistem pengendalian internal pada suatu lembaga, maka semakin kecil risiko terjadinya tindak kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi adalah integritas. Integritas adalah sifat kejujuran dan moralitas yang mencerminkan keutuhan pribadi dalam tindakan, perilaku, dan keputusan seseorang. Integritas berkaitan dengan nilai dan etika yang dipegang oleh individu dalam organisasi. Tingkat integritas yang tinggi dapat mengurangi elemen rasionalisasi dalam *Fraud Triangle*. Dengan menanamkan budaya integritas yang kuat, individu dalam organisasi akan lebih sulit untuk merasionalisasi tindakan kecurangan karena nilai-nilai etika yang kuat dan komitmen terhadap kejujuran. Individu yang memiliki integritas yang tinggi cenderung memiliki sikap kredibel, bertanggung jawab, dan arif dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan (Budiarto et al., 2023). Integritas memiliki kaitan yang erat dengan kecurangan akuntansi, hal ini mencakup kejujuran dalam praktik keuangan dan akuntansi perusahaan. Kecurangan akuntansi dapat terjadi jika seseorang atau suatu

organisasi melanggar standar-standar praktik keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Integritas merupakan salah satu nilai yang harus dipegang oleh setiap karyawan, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip perusahaan. Dalam praktiknya, LPD mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi prinsip kepatuhan dan tanggung jawab bersama di lingkungan Desa Adat. Karyawan LPD Belusung yang melakukan kecurangan akuntansi dapat diketahui bahwa integritas dari perusahaan masih lemah. Kecurangan tersebut dilakukan oleh karyawan LPD dengan tidak jujur dan tidak bertanggungjawab dalam pencatatan dana setoran nasabah demi keuntungan pribadi. Kasus LPD Belusung menunjukkan bahwa integritas sangat penting ditanamkan oleh setiap karyawan agar dapat mebantengi diri untuk melakukan tindak kecurangan. Semakin tinggi integritas yang dimiliki, maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang terjadi.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian dari Putri (2021), yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Tingginya integritas yang dimiliki oleh seseorang dapat mencegah terjadinya kecurangan di setiap perusahaan. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Rahayu & Sudiana (2023) yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian dari Damayanti & Purwantini (2021) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principal. Asimetri informasi terjadi antara principal dan agen yang menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Penelitian

Robani & Halimatusyadiah (2021) menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan tingkat kecurangan akuntansi yang lebih tinggi, karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat dengan mudah memanipulasi catatan keuangan, yang mana hal ini meningkatkan risiko terjadinya kecurangan.

Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki lebih banyak atau lebih baik informasi dibandingkan dengan pihak lain. Karyawan LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah dapat menunjukkan adanya asimetri informasi dalam organisasi. Dalam hal ini, karyawan yang melakukan penggelapan dana nasabah memiliki akses terhadap informasi lebih banyak yang tidak dimiliki oleh nasabah, sehingga terdapat ketidakselarasan informasi antara karyawan dan nasabah. Nasabah tidak mengetahui bahwa tabungan mereka tidak dicatat dalam sistem komputer LPD. Puspawati memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk melakukan penyelewengan. Asimetri informasi ini memungkinkan Puspawati untuk mengeksekusi skema korupsi karena nasabah bergantung pada integritas LPD untuk mengelola tabungan mereka dengan jujur dan akurat. Nasabah tidak memiliki akses atau cara untuk memverifikasi secara langsung catatan tabungan mereka dalam sistem LPD. Oleh karena itu, asimetri informasi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Sudiana (2023) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat asimetri informasi, semakin tinggi pula tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Febrianti & Kusmawati (2022). Adanya asimetri informasi dapat

mempengaruhi terjadinya risiko kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Husnatarina & Diarsyad (2023) menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Secara umum, sistem komputerisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem elektronik yang menggunakan teknologi komputer untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta menghasilkan output di bawah pengawasan instruksi program (Karim et al., 2020). Sistem terkomputerisasi dapat memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah dibaca karena data tersaji secara terstruktur. Oleh karena itu, penerapan sistem terkomputerisasi yang efektif dan efisien pada sebuah organisasi dapat memberikan manfaat dalam hal peningkatan kualitas informasi keuangan dan meminimalisir kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Sistem teknologi yang mendukung dan tepat dapat memberikan control yang lebih baik (Alifiananda et al., 2021).

Adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan LPD Belusung menunjukkan bahwa penerapan sistem terkomputerisasi masih belum memadai dan kontrol sistem yang kurang baik. Di LPD Belusung pencatatan transaksi sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam melakukan pencatatan keuangan. Namun, meskipun sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi kecurangan masih dapat terjadi di LPD tersebut. Puspawati didakwa melakukan pidana korupsi LPD Belusung karena tidak mencatatkan jumlah dana tabungan nasabah pada data atau sistem komputer LPD Belusung. Sehingga, rekapitulasi setoran tabungan nasabah dilakukan belum tersistem pada komputer. Oleh karena itu variabel sistem terkomputerisasi menjadi variabel dalam penelitian ini.

Mengantisipasi kasus kecurangan tersebut dibutuhkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi. Dengan menganalisis faktor-faktor di atas dalam konteks lembaga perkreditan desa di Kecamatan Tampaksiring, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana meningkatkan integritas, penerapan sistem terkomputerisasi yang efektif, pengendalian internal yang kuat, dan mengatasi asimetri informasi untuk mengurangi tingkat kecurangan akuntansi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian Putri (2021) dengan persamaan, penelitian menguji kembali variabel pengaruh pengendalian internal, integritas, dan asimetri informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pengendalian internal, asimetri informasi, dan integritas terhadap kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, menguji kembali variabel pengendalian internal, integritas, dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi pada LPD Kecamatan Tampaksiring dapat memberikan wawasan yang penting dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan akuntansi. Serta, perbedaannya adalah penelitian ini akan menambah variabel baru yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu, penerapan sistem terkomputerisasi terhadap kecurangan akuntansi. Sistem terkomputerisasi dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan akuntansi melalui fitur-fitur seperti audit trail, kontrol akses, dan validasi otomatis, sehingga dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara teknologi informasi dan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan

Desa di Kecamatan Tampaksiring. Faktor-faktor tersebut meliputi pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan penerapan sistem terkomputerisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi, dan Penerapan Sistem Terkomputerisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tampaksiring)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat kasus kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tampaksing pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Belusung berupa penggelapan dana nasabah oleh oknum karyawan.
2. Masih lemahnya sistem pengendalian internal. Hal ini dikarenakan kasus tersebut terjadi karena terdakwa mampu membuat bilyet deposito tanpa sepengetahuan Ketua LPD dan tidak menyetorkan deposito pada LPD. Sehingga dapat diindikasikan belum adanya pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang efektif pada organisasi.
3. Integritas yang masih rendah. Karyawan LPD Belusung yang melakukan kecurangan akuntansi dapat diketahui bahwa integritas dari perusahaan masih lemah. Kecurangan tersebut dilakukan oleh karyawan LPD dengan tidak jujur dan tidak bertanggungjawab dalam pencatatan dana setoran nasabah demi keuntungan pribadi. Kasus LPD Belusung menunjukkan

bahwa integritas sangat penting ditanamkan oleh setiap karyawan agar dapat mebantengi diri untuk melakukan tindak kecurangan.

4. Masih terjadinya asimetri informasi. Hal ini dikarenakan, Karyawan LPD yang melakukan penggelapan dana nasabah dapat menunjukkan adanya asimetri informasi dalam organisasi. Dalam hal ini, karyawan yang melakukan penggelapan dana nasabah memiliki akses terhadap informasi lebih banyak yang tidak dimiliki oleh nasabah, sehingga terdapat ketidakselarasan informasi antara karyawan dan nasabah.
5. Penerapan sistem terkomputerisasi masih belum memadai dan kontrol sistem yang kurang baik. Di LPD Belusung pencatatan transaksi sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam melakukan pencatatan keuangan. Namun, meskipun sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi kecurangan masih dapat terjadi di LPD tersebut. Puspawati didakwa melakukan pidana korupsi LPD Belusung karena tidak mencatatkan jumlah dana tabungan nasabah pada data atau sistem komputer LPD Belusung.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasan yang akan dibahas tidak keluar dari maksud dan tujuan penelitian ini di buat. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu, permasalahan pengaruh pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan penerapan sistem terkomputerisasi terhadap kecurangan akuntansi pada

Lembaga Perkreditan Desa (LPD), begitu juga dengan data yang hanya mencangkup dengan penelitian ini saja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
2. Bagaimanakah pengaruh integritas terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
3. Bagaimanakah pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
4. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem terkomputerisasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh integritas terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem terkomputerisasi terhadap kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dan pengetahuan di bidang akuntansi terutama untuk meningkatkan wawasan mengenai kecurangan (*fraud*) dan faktor yang mempengaruhi kecurangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LPD di Kecamatan Tampaksiring

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi LPD di Kecamatan Tampaksiring dalam upaya pencegahan dan mengurangi tingkat kecurangan akuntansi.

b. Bagi Peneliti

Mampu memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan tentang kecurangan akuntansi dan faktor yang mempengaruhi kecurangan tersebut.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh pengendalian internal, integritas, asimetri informasi, dan penerapan sistem terkomputerisasi terhadap kecurangan akuntansi

